

BAB 4

KESIMPULAN

Masyarakat etnis Rohingya adalah salah satu kelompok etnis yang mengalami penindasan. Kelompok etnis Rohingya adalah salah satu kelompok etnis yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sehingga mereka masuk kedalam kategori *stateless people* atau menurut UNHCR adalah manusia yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan manapun.¹¹⁶ Pemerintah Myanmar tidak mengakui identitas mereka sejak tahun 1982. Akibatnya kelompok Rohingya mengalami kejadian seperti kekerasan, diskriminasi, hingga penganiayaan.¹¹⁷ Karena hal tersebut, banyak masyarakat Rohingya yang akhirnya bermigrasi untuk mendapatkan suaka dari negara lain, dengan harapan mereka mendapatkan tempat yang lebih layak dan aman. Banyak dari mereka akhirnya harus bermigrasi ke negara lain dengan menaiki perahu yang kondisinya memprihatinkan. Ironisnya juga dalam beberapa kasus, bahkan beberapa kehadiran mereka ditolak di berbagai tempat, termasuk Indonesia. Alasan dari penolakan Indonesia terhadap kedatangan pengungsi Rohingya terlihat sangat kuat karena Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Akan tetapi, walaupun Indonesia adalah negara yang tidak menandatangani perjanjian konvensi pengungsi 1951, namun pada tahun 2015, pemerintah

¹¹⁶ UNHCR, "About Statelessness," The UN Refugee Agency (UNHCR, n.d.), <https://www.unhcr.org/ibelong/about-statelessness/#:~:text=In%20simple%20terms%2C%20this%20means.all%20regions%20of%20the%20world.> Diakses pada 31 Juni 2023.

¹¹⁷ UNHCR, "Rohingya Refugee Crisis: Supporting the Stateless Minority Fleeing Myanmar | USA for UNHCR," Unrefugees.org, 2017, <https://www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/>. Diakses pada 29 Mei 2023.

Indonesia justru menerima kedatangan pengungsi Rohingya serta membantu kelompok etnis Rohingya untuk mendapat keadilannya. Dengan menggunakan kerangka berpikir analisis kebijakan luar negeri oleh Christopher Hill, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan suatu negara, yaitu faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti,, **“Mengapa Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, sementara Indonesia bukanlah penandatangan dari Konvensi Pengungsi 1951?”**.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal memiliki dampak yang besar dalam keputusan kebijakan suatu negara. Faktor eksternal yang berpengaruh dalam penerimaan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia adalah faktor dari aktor transnasional. Hal ini disebabkan oleh permasalahan pengungsi yang selalu melibatkan banyak aktor lintas negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat dua aktor transnasional yang memiliki pengaruh besar dalam isu pengungsi Rohingya, yaitu UNHCR dan IOM. Kedua aktor tersebut adalah aktor yang berfokus pada permasalahan pengungsi. Pada bagian ini, pengaruh dari UNHCR terlihat lebih besar ketimbang IOM. Ketika PBB, badan inti dari UNHCR, memberikan peringatan terhadap aksi Indonesia yang telah menolak kedatangan pengungsi Rohingya, Indonesia dengan sigap menanggapi peringatan tersebut dengan cara mengirimkan Menteri Luar Negeri untuk melakukan diskusi dengan negara lain yang berkaitan erat dengan masalah pengungsi Rohingya, yaitu Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Namun forum diskusi tersebut tidak efektif karena ketidakhadiran Myanmar. Alhasil,

Indonesia mengambil langkah dengan Myanmar untuk melakukan hubungan bilateral. Forum bilateral antara Indonesia dan Myanmar berisikan kesepakatan mengenai aksi penyuluruhan bantaun kemansuiaan dari Indonesia dapat masuk ke wilayah Rakhine State. Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia dapat membantu pengungsi Rohingya dan korban konflik di Myanmar. Berhasilnya kesepakatan tersebut juga membuat Indonesia menerima kedatangan pengungsi Rohingya dengan bantuan dari UNHCR dan IOM. Bantuan yang diberikan oleh kedua organisasi internasional tersebut berupa bantuan pengalokasian tempat suaka permanen serta status pengungsi bagi pengungsi Rohingya.

Selain faktor eksternal, dalam penelitian ini terdapat empat faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya adalah faktor media massa, opini publik, kelompok kepentingan, dan identitas. Setelah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, media menjadi salah satu pihak yang berperan aktif dalam menyebarkan informasi. Mulai dari media luar hingga nasional meliput masalah pengungsi, terutama yang berkaitan dengan penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia. Akibat banyaknya berita mengenai kondisi pengungsi rohingya, maka semakin banyak masyarakat Indonesia yang prihatin dengan kelompok masyarakat etnis Rohingya. Respon yang telah masyarakat Indonesia curahkan dalam bentuk kritik serta dorongan untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia dan diluar didasari atas dasar kemanusiaan dan dasar solidaritas. Rasa prihatin ini tidak dibatasi untuk pengungsi yang berada di Indonesia saja, namun masyarakat

Indonesia juga kerap menyuarakan suaranya agar permasalahan pengungsi ini cepat terselesaikan.

Opini publik adalah kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya terhadap politikus atau pemerintah mengenai suatu isu. Dorongan dari opini publik berawal dari kabar penolakan kedatangan pengungsi Rohingya oleh TNI. Karena hal ini, masyarakat Aceh, yang merupakan destinasi dari pengungsi Rohingya, geram dan bergerak sendiri walaupun telah diancam dikenai hukuman oleh pihak Indonesia. Namun ancaman tersebut tidak menggoyahkan tekad baik masyarakat Aceh untuk membantu pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Dengan tersebarnya informasi mengenai keadaan pengungsi Rohingya, semakin banyak masyarakat yang prihatin dengan hal tersebut. Opini ini disampaikan melalui berbagai jalur komunikasi, misalnya seperti melakukan demonstrasi turun ke jalan, menulis artikel dan, melewati koran serta media sosial. berbagai cara, ada yang mendatangi gedung pemerintahan Indonesia dan ada juga yang menulis artikel berisikan masukan-masukan mengenai sebagaimana seharusnya Indonesia bersikap terhadap masalah pengungsi Rohingya. Tidak hanya masyarakat saja yang turun untuk mengutarakan opininya, bahwa Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla ikut berbicara mengenai penolakan yang terjadi.

Faktor ketiga dalam faktor internal adalah kelompok kepentingan. Faktor ini bermain peran dalam pergerakan Indonesia terhadap masalah pengungsi Rohingya. Terdapat dua cara bagaimana kelompok kepentingan melakukan aksinya. Pertama, terdapat kelompok yang melakukan pendekatan yang baik

seperti DPR. DPR bekerja untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke badan pemerintahan. Dengan banyaknya gerakan masyarakat terhadap permasalahan pengungsi Rohingya, DPR mendengar rakyat dan mendorong pemerintah untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain DPR, terdapat kelompok NGO berbasis Islam yang melakukan aksi membantu pengungsi Rohingya dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, terdapat kelompok Islam, FPI, yang memakai cara tidak benar untuk menyuarakan aspirasinya ke masyarakat. Terlepas dari perbedaan sikap dari kelompok-kelompok tersebut, pemerintah Indonesia mendapat tekanan dan dorongan dari mereka. Maka dari itu, Indonesia melakukan berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya.

Faktor terakhir dalam faktor internal adalah identitas. Masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan beragama Islam dapat memberikan dorongan yang cukup terlihat dalam isu pengungsi Rohingya. Mengingat kesamaan identitas antara kelompok pengungsi Rohingya dengan mayoritas masyarakat Indonesia, membuat masyarakat mendesak pemerintah Indonesia untuk turut ikut serta dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Karena hal ini, terdapat banyak aksi dan gerakan yang mendorong pemerintah untuk berpartisipasi terhadap penyelesaian masalah pengungsi Rohingya. Tidak hanya identitas agama saja, namun Indonesia bergerak atas nama identitas Pancasila. Pancasila sudah seperti tulang punggung negara Indonesia. Prinsip dan nilai-nilai negara tertulis di dalam Pancasila. Sesuai dengan Pancasila sila kedua yang menjelaskan mengenai kemanusiaan, sudah seharusnya Indonesia

tidak menolak korban pelanggaran HAM dan membiarkan masalah pengungsi Rohingya terus-menerus terjadi. Maka dari itu, Indonesia terdorong untuk menjalankan tugasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM.

Dari analisis pada bab 3, dapat dilihat bahwa faktor aktor transnasional memang menjadi pondasi atau alasan pertama pemerintah Indonesia untuk bergerak mengenai isu pengungsi Rohingya, namun banyaknya gerakan, dorongan, hingga kecaman yang diutarakan oleh masyarakat Indonesia membuat pemerintah Indonesia terus mengupayakan segala cara untuk meminimalisir hingga menghentikan konflik Rohingya. Terutama kecaman yang dirasakan oleh masyarakat beragama Budha di Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia lebih berusaha dalam menyelesaikan masalah isu pengungsi Rohingya di Indonesia dan pengungsi Rohingya secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- aceHTrend.com. "Manusia Perahu Rohingya Tidak Ditemukan Di Aceh, Kemana Mereka?" aceHTrend.com, Mei 28, 2018. <https://www.acehtrend.com/news/manusia-perahu-rohingya-tidak-ditemukan-di-aceh-kemana-mereka/index.html>.
- Albert, Eleanor, and Lindsay Maizland. "What Forces Are Fueling Myanmar's Rohingya Crisis?" Council on Foreign Relations, January 23, 2020. <https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis>.
- BBC. "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis." *BBC News*, Januari 23, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.
- BBC News Indonesia. "Sekelompok Warga Aceh 'Menolak' Pengungsi Rohingya, UNHCR Ingatkan Perlunya Solidaritas Kemanusiaan," December 8, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63905072#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20dikumpulkan%20oleh>.
- BBC News Indonesia. "TNI Akui Minta Kapal Pengungsi Rohingya Tidak Mendarat Di Indonesia," May 12, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150511_rohingya_tni.
- Cahyono, Sofyan. "5 Muslim Rohingya Terdampar Di Perairan Aceh - Jawa Pos." *Jawa Pos*, April 6, 2018.

<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0151865/5-muslim-rohingya-terdampar-di-perairan-aceh>.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. London: Sage Publications Ltd, 2014.

developer, medcom id. “#SaveRohingya, Menjaga Indonesia.” medcom.id, September 4, 2017. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/0KvGEM4N-saverohingya-menjaga-indonesia>.

DPR-RI. “Setop Kejahatan Kemanusiaan Di Rohingya,” 2017. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17395/t/javascript>.

euronews. “Indonesia’s Muslims Urge More Support for Myanmar’s Rohingyas.” Euronews.com, September 16, 2017. <https://www.euronews.com/2017/09/16/indonesias-muslims-urge-more-support-for-myanmars-rohingyas>.

Global Focus. “Situation Reports,” n.d. <https://reporting.unhcr.org/situation-reporting?sitcode=505&year=2018>.

Hidayat, Rafki. “Kekerasan Rohingya: Apa Yang Harus Dilakukan Warga Indonesia?” *BBC News Indonesia*, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144847>.

Hill, Christopher. *Foreign Policy in the Twenty-First Century*. London: Palgrave, 2016.

Human Rights Watch. "Rohingya | Human Rights Watch." www.hrw.org, 2022. <https://www.hrw.org/tag/rohingya>.

International Organization for Migration. "Who We Are," n.d. <https://www.iom.int/who-we-are>.

rccchicago.org. "History of the Rohingya | Rohingya Culture Center," July 22, 2022. <https://rccchicago.org/history-of-the-rohingya/>.

IPAC. "Indonesia and the Rohingya Crisis," 2018. <https://understandingconflict.org/en/publications/Indonesia-and-the-Rohingya-Crisis>.

Irwansyah, and Al Asya'ari. "Rohingya Muslims in Indonesia: Interaction, Stigmatization and Religious Response." *FIKRAH* 10, no. 2 (Desember 22, 2022): 241. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.16287>.

Lestari, Sri. "Ratusan Pengungsi Rohingya Di Aceh Bergantung Pada Bantuan." BBC News Indonesia, Mei 15, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150515_indonesia_rohingya_cangkoi.

Liliansa, Dita, and Anbar Jayadi. "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?" *Indonesia Law Review* 5, no. 3 (December 31, 2015): 324. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>.

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR. "Opini – Selamatkan Rohingya, Indonesia Tidak Boleh Diam - Fakultas Magister Ilmu Hukum FH UNAIR."

<https://mih.fh.unair.ac.id/opini-selamatkan-rohingya-indonesia-tidak-boleh-diam/>.

Media, Kompas Cyber. “Mengenal Lebih Jauh Tentang FPI Yang Dipimpin Rizieq Shihab... Halaman All.” KOMPAS.com, 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/03/10290301/mengenal-lebih-jauh-tentang-fpi-yang-dipimpin-rizieq-shihab?page=all>.

nationalgeographic.grid.id. “Peran Penting Aceh Dalam Menampung Pengungsi Rohingya - National Geographic,” June 17, 2015. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13299370/peran-penting-aceh-dalam-menampung-pengungsi-rohingya>.

Nations, United. “UNHCR - the UN Refugee Agency.” Unhcr.org, 2019. <https://www.unhcr.org/>.

Prabaningtyas, Raden Ajeng Rizka Fiani. “Indonesia and the International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (December 31, 2019): 131–46. <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i2.152>.

Pratama, Oleh Yoga. “Pantaskah FPI Dibubarkan ?” polkam.go.id, February 18, 2016. <https://polkam.go.id/pantaskah-fpi-dibubarkan/>.

Pratisti, Siti Aliyuna, Taufik Hidayat, and Deasy Silvy Sari. “When Solidarity Is Trampled by Religious Sentiment: Outlining Indonesian Muslim Solidarity toward Rohingya Refugees.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 23, no. 1 (August 14, 2019). <https://doi.org/10.22146/jsp.35732>.

Rahman, Utpala. "The Rohingya Refugee: A Security Dilemma for Bangladesh." *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 8, no. 2 (May 28, 2010): 233–39. <https://doi.org/10.1080/15562941003792135>.

rccchicago.org. "History of the Rohingya | Rohingya Culture Center," July 22, 2022. <https://rccchicago.org/history-of-the-rohingya/>.

Robbins, Lindsay. "The Rohingya Case in Aceh: Indonesia's Role as a Destination for Refugees." *Towson University Journal of International Affairs* LIII, no. 2 (2020). <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/wp.towson.edu/dist/b/55/files/2018/04/S20.Robbins.pdf>

Saeri, Muhammad. "The Effect of Domestic Political Factors and Forces to the Foreign Policy Making in Indonesia." JOEEP. *Journal of Emerging Economies and Policy*, May 12, 2019. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/870385>.

Sari, Deasy Silvyia. "Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 1 (June 22, 2018): 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>.

Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Raka Fiqri. "Overview of Human Rights Violations against Rohingya Ethnicity in Burma and Uighur Tribe in China in International Law Perspectives." www.atlantispress.com. Atlantis Press, March 4, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.010>.

Suyastri, Cifebrima, Rika Isnarti, and Rendi Prayuda. "The Challenges of Indonesia as a 'Quintessential Transit Country' for Refugees:

Cases of Refugees in City of Pekanbaru.” *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (December 30, 2020): 149–64. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i2.2162>.

Thiel, Markus, and Jeffrey Maslanik. “Transnational Actors.” *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, March 1, 2010. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.105>.

Tim. “Urutan Lambang Pancasila, Sila 1-5, Dan Maknanya.” edukasi, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221110112516-569-871956/urutan-lambang-pancasila-sila-1-5-dan-maknanya>.

UNHCR. “About Statelessness.” The UN Refugee Agency. UNHCR, n.d. <https://www.unhcr.org/ibelong/about-statelessness/#:~:text=In%20simple%20terms%2C%20this%20means,all%20regions%20of%20the%20world..>

———. “Rohingya Refugee Crisis Explained.” www.unrefugees.org, August 25, 2021. <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>.

———. “Rohingya Refugee Crisis: Supporting the Stateless Minority Fleeing Myanmar | USA for UNHCR.” [Unrefugees.org](http://www.unrefugees.org), 2017. <https://www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/>.

UNHCR. “UNHCR in Indonesia - UNHCR Indonesia.” UNHCR, 2016. <https://www.unhcr.org/id/en/unhcr-in-indonesia>.

Utami, Dian Wahyu, Rahmat Saleh, and Irin Oktafiani. "Indonesia's Constitutional Immigration Policy: A Case of Rohingya Ethnic Group Refugees." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 8, no. 2 (December 28, 2018): 119–32. <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.84>.

VIVA, PT VIVA MEDIA BARU-. "Puluhan Pengungsi Rohingya Terdampar Lagi Di Aceh." www.viva.co.id, April 20, 2018. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1028696-puluhan-pengungsi-rohingya-terdampar-lagi-di-aceh>.

Weis, Paul. "The Refugee Convention, 1951 the Travaux Preparatoires Analysed with a Commentary," 1951. <https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>.

Widiyanta, Danar, Ririn Darini, and Mudji Hartono. "Islam Menghadapi Junta Militer di Myanmar." *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (December 12, 2019). <https://doi.org/10.21831/moz.v10i1.28766>.

www.aljazeera.com. "Timeline: Five Years of Rohingya Refugee Crisis," August 25, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/25/timeline-five-years-of-rohingya-refugee-crisis>.